

## **BAB II**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

#### **“Pertarungan Dua Institusi Penegak Hukum”**

Berkaitan dengan akar perseteruan Polri dan KPK di mana terungkapnya dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tinggi Polri adalah awal penyadaran untuk masyarakat akan tindakan melanggar hukum yang dilakukan Polri sebagai institusi. Hal ini menarik karena keduanya (Polri dan KPK) adalah institusi penegak hukum yang seharusnya saling bekerja sama dalam menegakkan hukum di Indonesia. Sejatinya, dan sesuai dengan sistem hukum peradilan pidana, tugas penyidikan serta penyelidikan korupsi ada di tangan polisi karena pengusutan korupsi masuk ranah penegakan hukum. Hal tersebut dipertegas dan tertera pada Undang-undang Kepolisian No. 2/2012 pasal 14 ayat satu g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat diusut oleh polisi (Napitupulu, 2010: 71).

Antara polisi dan KPK tidak ada pembagian khusus, apalagi tertulis, terkait perburuan kasus korupsi. Keduanya bisa saja menindaklanjuti laporan yang masuk terkait kasus dugaan korupsi, tidak ada batasan atau koridor yang menghalangi polisi untuk menangani kasus korupsi (Napitupulu, 2010:80). Besar atau kecil kasus korupsi itu, polisi wajib mengusutnya. Keberadaan KPK bukan sebagai penghambat kerja polisi, tetapi sebagai rekan kerja untuk membasmi

korupsi. Sebagai rekan kerja, tentu saja kedua institusi ini harus saling bekerja sama. Bentuk kerja sama itu ditunjukkan dengan berbagai cara, salah satunya di bidang sumber daya manusia. Tim penyelidik dan penyidik di KPK berasal dari kepolisian (Indrayana, 2011:105). Tentu ini karena hanya polisi yang memiliki kemampuan penyelidikan dan penyidikan yang mumpuni dan terlatih, tidak ada yang lebih baik kemampuannya selain polisi jika kita menilik dari latar belakang pendidikan mereka. Hal ini sudah terbukti dalam beberapa pengungkapan kasus terorisme, penggrebekan pabrik-pabrik penghasil narkoba, dan penangkapan mafia kelas kakap di Indonesia. Dua paragraf di atas menyampaikan sisi hitam dan putih polisi Indonesia. Meskipun banyak menuai kritikan, pihak kepolisian Indonesia setidaknya memiliki kualitas yang dapat kita banggakan.

Dalam perseteruan ini sisi hitam kepolisian terungkap setelah KPK berani menggeledah Markas Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri di Jalan M. T. Haryono Kavling 37-38 pada tanggal 30 Juli 2012. Keberanian serta tindakan KPK untuk menggeledah telah mengawali babak baru perseteruan. Dua institusi yang sejatinya telah bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi, tak dapat menghindari perseteruan. Sebagai institusi yang lebih tua tentunya Polri berupaya keras dan tidak ingin citranya semakin tercoreng oleh pengungkapan KPK. Alhasil keduanya akan bertarung dengan kekuatannya masing-masing (argumen dan saksi-saksi) untuk saling mempertahankan diri mengoreksi, menyalahkan bahkan hingga menjatuhkan. Kasus korupsi, kisah perseteruan antar lembaga penegak hukum, sejarah lembaga baru penegak hukum, dan kekuatan foto dalam menyampaikan maknanya. Itulah empat hal utama yang akan kita

bicarakan dalam penelitian ini. Menemukan kekuatan makna di balik sebuah kemasan berita foto menjadi jawaban serta kesimpulan akhir penelitian ini.

#### **A. Komisi Pemberantasan Korupsi sebuah Angin Sejuk (Optimisme)**

Dahulu pernah dikatakan, bahwa Indonesia itu negeri yang banyak korupsi, tetapi tidak ada koruptornya, karena hampir tidak ada kasus korupsi yang diungkap dan dimejahijaukan. Banyak kasus dugaan korupsi oleh penguasa dan pejabat hanya menjadi kisah korupsi di masyarakat. Cerita-cerita tadi yang terjadi sebelum era reformasi kini telah berubah semenjak gagasan dan tindakan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama. Indonesia pasca reformasi adalah Indonesia yang lebih antikorupsi. Indonesia yang bercita-cita semakin semangat dan semakin gigih bertarung melawan koruptor. Pasca reformasi adalah momentum kebangkitan Indonesia yang lebih demokratis. Negara yang lebih demokratis mengindikasikan negara yang lebih antikorupsi. Setidaknya dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa sistem demokratis adalah sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Itulah tiga hal yang membantu terciptanya *good governance* (Indrayana, 2011: 150).

Hal-hal di atas tentunya akan mendorong partisipasi positif masyarakat tanpa terkecuali pers. Pers pasca reformasi adalah harapan pers yang semakin bebas, secara khusus dalam hubungannya dengan penelitian ini. Tiada henti, tanpa putus hampir setiap harinya kita disuguhkan kasus-kasus korupsi yang diberitakan melalui media cetak maupun media elektronik. Adanya keterbukaan hampir di segala lini mengantarkan pada kepedulian dan partisipasi publik untuk Indonesia yang lebih bebas dari korupsi tentunya. Nilai positif serta kontrol dari masyarakat

secara khusus tentang korupsi dan kawan-kawannya dibuktikan dengan lahirnya organisasi, perhimpunan, bahkan hingga lembaga swadaya masyarakat serta sejenisnya di tingkat daerah. Sebut saja contohnya ada ICW (*Indonesian Corruption Watch*), Pusat kajian anti (Pukat) Korupsi UGM didirikan oleh Denny Indrayana (Wamenkumham 2011-2014), Masyarakat Transparansi Indonesia dan LSM antikorupsi bernama *Anti Corruption Committee* (ACC) yang didirikan oleh Abraham Samad (Ketua KPK 2011-2015) dan kawan-kawan di Makasar, Sulawesi Selatan.

Organisasi atau lembaga rintisan yang bersumber dari bawah (rakyat) berpengaruh cukup signifikan bagi pemerintah pusat. Meskipun mereka yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh antikorupsi hanyalah seorang pengacara kelas lokal lebih tepatnya penegak hukum daerah, semangatnya untuk membentuk organisasi antikorupsi di Indonesia terbukti telah membuahkan hasil. Ketika telah terjadi kebuntuan di pusat pemerintahan akan lingkaran korupsi yang tak kunjung berakhir bahkan semakin mengakar, hingga badan penegak hukum sekelas Polri dan Kejaksaan, mereka hadir sebagai angin sejuk. Berangkat dari keprihatinan serta semangat lembaga-lembaga antikorupsi di daerah, berdirilah beragam badan atau komisi sebagai cikal bakal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih menasional. Sebut saja ada Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) serta Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). KPKPN dan TGPTPK memiliki tugas yang cukup berbeda, di mana KPKPN bertugas untuk mengawasi serta memeriksa harta kekayaan pejabat

negara sedangkan TGPTPK memiliki tugas untuk memburu para koruptor yang diduga bersembunyi di luar negeri (Napitupulu, 2010: 43).

Wacana dan rencana pembentukan komisi anti korupsi yang mandiri serta terbebas dari segala tekanan untuk negeri ini akhirnya terwujud. Ya, inilah angin sejuk bagi penegakan hukum Indonesia. Lembaga antikorupsi yang benar-benar mampu bertindak dengan kekuatan serta tekad baru. Kekuatan undang-undang antikorupsi yang didukung oleh kemampuan serta kewenangan untuk bertindak dan mencegah korupsi. Kemandirian sistem penegakan hukum secara khusus dalam penanganan kasus korupsi menjadi kunci yang telah membuka kesadaran masyarakat bahwa koruptor telah banyak merugikan mereka. (Indrayana, 2011: 30).

Fakta optimisme masyarakat akan KPK, telah menghantarkan saya (peneliti), anda, dan kita semua yang turut serta merasakan titik kebangkitan penegakan hukum di Indonesia bahwa krisis ini dapat terselesaikan. Meskipun harus melalui perjalanan waktu cukup lama serta lingkaran setan korupsi yang tak kunjung putus. Prestasi penegakan hukum dalam hal ini penanganan kasus korupsi telah memasuki babak baru. Habis gelap terbitlah terang itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi satu dekade setelah kelahiran KPK.

#### **A. 1. Bertumbuh, dipukuli, hingga pada akhirnya dilumpuhkan**

Memang sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadili tindak pidana korupsi, hanya saja hal-hal yang dikhawatirkan bahwa badan-badan dan organisasi pemerintah serta masyarakat lainnya lalu menjadi terlena dengan adanya KPK itu. Alasan ini muncul karena tindak pidana korupsi

telah dilakukan oleh pejabat kelas atas dimana mereka sebenarnya secara pendapatan telah berkecukupan. Hal ini terjadi karena selalu ada peluang. Pemberantasan korupsi dengan program KPK tidak akan menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. Perlu juga upaya untuk menghilangkan sumber-sumber yang menyebabkan adanya hal-hal korup itu. Maka program-program preventif perlu diadakan disamping program repressif dengan KPK itu. Bahkan terhitung sudah sepuluh tahun lebih komisi tersebut hadir menunjukkan eksistensinya dengan segudang prestasi pengungkapan kasus korupsi. Namun, bukannya tanpa halangan serta kendala, serangan, bahkan pelemahan bertubi-tubi telah dirasakan komisi anti korupsi ini. Meskipun secara data dan survey dari *Transparency International* Indonesia berada di urutan ke-118 dari 176 negara terkorup tetap saja hari kematian lembaga ini sangat dinantikan oleh beberapa bos besar pelaku korupsi yang sampai saat ini belum terungkap (Indrayana, 2011: 196). Ironis memang fenomena pemberantasan korupsi di negeri ini seperti dua sisi mata uang yang sangat jauh berbeda antara sisi satu dengan yang lainnya. Hingga pada akhirnya mengantarkan pada keadaan terburuk yaitu perseteruan antar sesama institusi penegak keadilan dan hukum.

Pendapat publik terhadap KPK secara khusus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini di bawah pimpinan Abraham Samad memang sangat besar (Setyarso, 2012:139). Faktanya adalah lembaga mana lagi yang mampu dan berani memberantas korupsi setangkas KPK? Harapan masyarakat telah terbayar dan kita patut bangga pada KPK. Namun sebagai peneliti dan juga sekaligus warga sipil yang ikut merasakan dampak prestasi KPK, ada baiknya jika kita juga melihat

begitu banyaknya serangan serta tindakan pelumpuhan lembaga ini. Ibarat peribahasa semakin besar dan tinggi sebuah pohon semakin besar pula angin yang menerpanya. Dalam sub-bab ini kita akan bersama-sama melihat fakta-fakta kelemahan KPK. Secara khusus dikemas oleh peneliti yang bertolak dari cerita di balik setiap pimpinan KPK dari awal berdiri hingga tahun 2012.

Melihat dari sejarahnya, serta setelah hantaran cerita-cerita positif pada sub-bab sebelumnya yang menjadi cikal bakal berdirinya KPK, ada sebuah tonggak sejarah naskah penting yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di mana berperan sebagai dasar hukum kewenangan KPK. Kesimpulannya KPK ini dilahirkan lewat undang-undang itu sendiri. Kemudian menilik dari tampuk pemegang pemerintahan setidaknya ada tiga presiden yang berperan dalam pembuatan naskah rancangan undang-undang tersebut: BJ Habibie, Abdurrachman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Ada pula lima Menteri Kehakiman turut membahas yaitu: Muladi, Yusril Ihza Mahendra, Baharudin Lopa, Marsilam Simanjuntak, dan kembali lagi pada Yuzril Ihza Mahendra. Penyusunan RUU dilakukan dengan sungguh-sungguh di mana melibatkan pihak luar seperti dari Bertrand de Speville and Associates Anti-Corruption Consultans serta studi banding ke Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. RUU KPK dibahas secara intensif selama satu tahun oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 30 Agustus 2001-26 November 2002. Setahun setelah disahkan, lima komisioner dipilih untuk memimpin komisi selama empat tahun (Setyarso, 2012: 160).

Periode pertama (2003-2007) kepemimpinan KPK dinahkodai oleh Taufiequrachman Ruki dengan anggota Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Sjahrudin Rasul. Masa-masa awal berdiri, KPK berhasil menangani kasur besar diantaranya pengadaan helikopter MI-2 buatan Rusia yang akhirnya menjerat dan menjebloskan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Ada pula penangkapan anggota Komisi Yudisial Irawady Joenoes dalam kasus suap pengadaan lahan Komisi Yudisial. Meskipun banyak kekurangan disana-sini antara lain belum memiliki kantor tetap kemudian pimpinan serta karyawan sempat tak bergaji karena sistem anggaran belum rapi, KPK jilid pertama ini mampu meyakinkan publik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan data-data berupa menyelamatkan kerugian negara sebesar 161 milyar (Setyarso, 2012: 162).

Periode kedua (2007-2012) tampuk kepemimpinan KPK dilanjutkan oleh Antasari Azhar dengan empat wakil ketua: Bibit Samad Rianto, Chandra M. Hamzah, Haryono Umar, dan Mochamad Jasin. KPK seri dua ini bisa dikatakan sebagai masa kejayaan sekaligus masa kejatuhannya. Suatu hal yang sangat kontras, karena di satu sisi berhasil mengungkap kasus besar sekaligus menjebloskan beberapa tokoh penting dalam penjara mulai dari jaksa, pengusaha hingga besan presiden, namun pada akhirnya komisi *superbody* itu harus jatuh terjungkal karena pimpinannya tersangkut kasus pembunuhan serta dua wakil ketuanya lainnya dikriminalkan oleh Polri dalam kasus penyalahgunaan wewenang (kpk.go.id, 2013). Komisi yang baru berumur tujuh tahun itu akhirnya

limbung. Perlahan namun pasti KPK di penghujung tahun 2009 menjadi macan ompong seiring dengan ditahannya tiga pejabat penting mereka. Inilah titik awal di mana KPK mulai menjadi musuh sendiri dalam jajaran institusi penegak hukum Indonesia. Bagaimana tidak, dua wakil ketua KPK saat itu yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dijadikan tersangka oleh Polisi dalam kasus pemerasan kepada Anggoro Widjojo dan Joko S. Tjandra. Polisi dalam institusinya yaitu POLRI seharusnya bekerja sama dengan KPK serta Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi (Majalah Tempo edisi 31 Desember 2012 - 6 Januari 2013, hal: 100).

Babak pertama perseteruan dua institusi penegak hukum di Indonesia akhirnya bergulir antara KPK dan POLRI. Ketegangan memuncak hingga pada akhirnya munculah istilah “cicak lawan buaya” yang ramai diperbincangkan serta diberitakan media masa. Istilah di atas muncul bermula dari dugaan penyadapan saluran telepon yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Kabareskrim saat itu Komisaris Jenderal Susno Duadji pada tanggal 29 Juni 2009 (Zulkarnaen, Kronologi Lengkap dari Anggoro Bibit Chandra lalu ke Susno <http://politik.kompasiana.com>, 2009). Jika kita menarik sedikit kebelakang dengan membaca dan merangkum beberapa pemberitaan media masa, setidaknya ditemukan beberapa penyebab utama kisah perseteruan yang terjadi mulai pertengahan tahun 2009 hingga awal tahun 2010. Pertama, pengungkapan kasus suap proyek pengadaan alat sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan di mana melibatkan Yusuf Erwin Faisal mantan ketua Komisi IV DPR serta direktur PT. Masaro Radiokom saat itu Anggoro Widjojo. Kedua,

terungkapnya keterlibatan ketua KPK jilid kedua Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Ketiga kasus perampokan dana nasabah Bank Century oleh pemiliknya sendiri yang berujung pada pemberian dana talangan "*bail out*" sebesar Rp. 6,7 triliun oleh pemerintah. Ketiga masalah di atas telah membuat KPK benar-benar dilumpuhkan karena diserang dari berbagai jurusan. Pada akhirnya kepemimpinan Antasari Azhar dalam KPK periode II hanya mampu bertahan hingga Oktober 2009. Ia tak mampu lagi menyelesaikan masa jabatannya hingga 2012 seiring dengan ditetapkannya sebagai tersangka pembunuhan serta semakin meruncingnya perseteruan antara KPK dan Polri akibat rencana penangkapan Komisaris Jenderal Susno Duadji (Setyarso, Redaksi Majalah Tempo edisi khusus KPK 2012: 100).

Pemimpin KPK yang tersisa saat itu tinggal Haryono Umar dan Mochammad Jasin. Latar belakang keduanya sebagai akuntan dan birokrat hanya diberikan tanggung jawab pada bidang pencegahan bukan penindakan. Alhasil beberapa penanganan kasus korupsi pun mengalami kemandekan dikarenakan mereka kehilangan dua motor di bidang penindakan kasus korupsi yaitu Chandra dan Bibit. Di masa sulit itu karyawan KPK masuk seperti biasa. Tapi di kantor, mereka tak bekerja. Tak pelak hal tersebut juga berdampak pada satu persatu kepemimpinan di level menengah KPK mulai mengundurkan diri dan lebih memilih untuk pindah ke lembaga lain. Sebut saja Chesna Anwar (Direktur Pengawasan Internal) dan Budi Ibrahim (Direktur Pengolahan Informasi dan Data) memilih untuk hengkang dari KPK sejak Maret 2010. Sebelum mereka ada

Lambok Hutaauruk (Direktur Gratifikasi) serta Roni Ihram Maulana (Direktur Monitoring) juga sudah memilih untuk angkat kaki (tempointeraktif.com, 2013).

Babak baru penyelamatan komisi independen inipun dimulai. Diawali dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi negeri ini yaitu dengan mengeluarkan keputusan Presiden memberhentikan Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dari jabatan wakil ketua KPK kemudian di samping itu ditanda tangani pula Perppu yang memungkinkan penunjukan langsung pelaksana tugas pimpinan KPK. Tindak lanjut dari Perppu tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim lima yang beranggotakan Menko Polhukam Widodo AS, Menkum HAM Andi Mattalatta, anggota Dewan Penasihat Presiden Adnan Buyung Nasution, praktisi hukum Todung Mulya Lubis, dan mantan ketua KPK jilid I Taufiequrachman Ruki. Tim lima ini bertugas untuk mengusulkan tiga nama pelaksana tugas pimpinan KPK kepada Presiden. Akhirnya pada tanggal 6 Oktober 2009 setelah mendapatkan nama-nama terpilih rekomendasi dari tim lima, Presiden melantik tiga orang pelaksana tugas pimpinan KPK yang akan bertugas selama kurang lebih enam bulan atau bisa dikatakan tepatnya hingga DPR memutuskan untuk mengganti mereka (Indrayana, 2011: 103).

Pelantikan ini ditetapkan berdasarkan Perppu nomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2009. Ketiga pelaksana tugas tersebut ialah mantan wakil ketua KPK jilid pertama Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Achmad Santosa, dan mantan deputi pencegahan KPK Waluyo. Meskipun hanya sebagai pelaksana tugas di bawah kepemimpinannya KPK berhasil

menyelesaikan beberapa kasus antara lain berhasil menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ismet Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Kepemimpinan Tumpak Hatorangan Panggabean tidak berlangsung lama tepatnya pada tanggal 15 Maret 2010 beliau diberhentikan dengan Keppres no. 33/P/2010 karena perpu nomor 4 tahun 2009 ditolak oleh DPR. Ketiga pelaksana tugas sementara tersebut pada akhirnya digantikan oleh Busro Muqodas berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh DPR pada awal tahun 2011 (KPK Litbang, 2011: 56).

Busro Muqodas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden sebagai pimpinan KPK menggantikan Antasari Azhar pada tanggal 20 Desember 2010. Busro Muqodas sebelum dilantik sebagai pimpinan KPK ia menjabat sebagai Komisi Yudisial RI periode 2005 – 2010. Kepemimpinan Busro Muqodas secara historis hanyalah melanjutkan tampuk pimpinan sebelumnya yaitu meneruskan masa jabatan Antasari Azhar yang berakhir pada tahun 2011. Tidak mengherankan jika Busro Muqodas merupakan pemegang tampuk kepemimpinan KPK tersingkat sepanjang sejarah lembaga ini. Di bawah kepemimpinannya KPK kembali dalam jalurnya dan menunjukkan kekuatan sebagai lembaga penegak hukum. Salah satu kasus korupsi yang terungkap yaitu tentang penyelewengan dana pembangunan wisma atlet Jakabaring di mana menjadi cikal bakal lengsernya beberapa pejabat tinggi negara seperti bendahara Partai Demokrat yang sekaligus anggota DPR Muhammad Nazarudin dan Menpora Andi Alfian Malarangeng. Meskipun berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi penting, Busro Muqodas tak mampu mempertahankan kepercayaan anggota DPR untuk

memilihnya kembali menjadi pimpinan KPK periode 2011-2015. Diluar prediksi dia kalah angka cukup telak dalam perolehan suara pemilihan calon ketua KPK oleh tokoh muda dari Sulawesi Selatan bernama Abraham Samad yang pada akhirnya hanya menempatkannya pada urutan kedua terbanyak (Zaenuddin, 2012: 2).

Perubahan cukup berarti terjadi pada pemilihan ketua KPK jilid empat. Pemimpin KPK terpilih jilid yang empat yaitu Abraham Samad, ternyata melalui proses yang cukup panjang dalam pencalonannya sebagai ketua KPK terpilih. Pada pemilihan ketua KPK tahun 2003 Abraham Samad telah memulainya namun sayang ia dinyatakan gagal secara administrasi oleh panitia seleksi karena usianya pada saat itu kurang dari empat puluh tahun. Kemudian pada tahun 2007 ia kembali mengajukan diri menjadi calon ketua KPK. Di tahun tersebut secara administratif dan tes menulis makalah kompetensi serta makalah personal dinyatakan lulus namun ia gagal pada tahap *profile assessment*. Pemilihan ketua KPK tahun 2011 untuk ketiga kalinya Abraham Samad kembali mendaftarkan diri. Di tahun 2011 tersebut ia berhasil menyisihkan 210 orang calon ketua KPK yang berasal dari berbagai macam latar belakang profesi dan pendidikan (Zaenuddin, 2012: 3).

KPK di bawah pimpinan Abraham Samad resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Desember 2011. Terhitung sejak awal 2012 ia mampu melanjutkan dan menuntaskan beberapa kasus korupsi menggantung dalam beberapa periode sebelumnya. Contohnya, kasus suap pembangunan wisma atlet Jakabaring, Sumatera Selatan yang berhasil menjerat

Angelina Sondakh, kemudian kasus korupsi sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor telah menjerat Menpora Andi Malarangeng. Prestasi terbaik sepanjang sejarah berdirinya KPK di mana semakin berani untuk menjerat koruptor-koruptor kelas kakap (Zaenuddin, 2012: 22).

Sejak awal terpilih sebagai ketua KPK, Abraham Samad beserta ke empat pimpinan lainnya menyadari bahwa tugas mereka semakin berat sebab publik menaruh harapan cukup besar. Di sisi lain kasus korupsi setiap tahunnya selalu berkembang dan selalu saja ada cara baru para koruptor untuk melancarkan aksinya. Caturwulan pertama di tahun 2012, menggugah keinginan Abraham Samad untuk berani mengungkap kasus korupsi lebih besar. Penekanannya adalah pada lembaga-lembaga pemerintah setingkat kementerian serta badan-badan penegak hukum yang selama ini belum tersentuh. Hasilnya ialah penyidikan mendalam terhadap kepolisian Republik Indonesia. Tepat satu bulan memasuki semester kedua tahun 2012, KPK dengan segala kekuatannya berhasil mengungkap kasus korupsi pengadaan simulator ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam tubuh Polri. Tak hanya itu, KPKpun menetapkan Irjen. Pol. Djoko Susilo sebagai tersangka. Dua hal di atas menjadi pencapaian tertinggi sepanjang sejarah kehadiran KPK. Meskipun bukan yang pertama, namun kembali bersinggungan dengan Polri dalam situasi yang berbeda telah menunjukkan kesungguhan serta keberanian KPK di bawah nahkoda Abraham Samad.

#### **A. 2. Perseteruan kembali dua institusi penegak hukum**

Beberapa modus penyerangan dan pelemahan KPK adalah menghilangkan atau melemahkan dasar hukum pemberantasan korupsi, hingga serangan fisik para

pejuang korupsi. Modus pertama sebut saja menyerang dasar hukum pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mengajukan uji materi perundangan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Terbukti sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 Undang-Undang KPK sudah 17 kali digugat. Kemudian modus yang kedua dari kisah perjalanan KPK adalah menjerat dan mematikan pejuang anti korupsi melalui rekayasa kasus hukum, seperti apa yang dialami langsung oleh dua pimpinan KPK terdahulu yaitu Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Kemudian jika melihat dalam perseteruan yang jilid kedua penyerangan serta pelemahan terang-terangan tertuju pada penyidik KPK yang secara kebetulan berasal dari Polri yaitu Novel Baswedan. Terlepas dari berbagai macam modus dalam pelemahan KPK, inilah kenyataan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum kasus korupsi (Indrayana, 2011: 97).

Berangkat dengan gebrakan KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad untuk bergerak lebih dalam menyentuh kasus-kasus korupsi serta penindakan kasus lebih lanjut. Secara khusus kasus korupsi tersebut terjadi pada tubuh lembaga kepolisian. KPK tidak dapat dengan mudah mengungkap kasus korupsi ini, karena Polri sendiri berstatus sama seperti KPK yang sejalan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Polri memiliki kekuatan dan wewenang yang sama dalam menegakan hukum, terlebih lagi jauh sebelum lahirnya KPK. Inilah sedikit gambaran mengenai cikal bakal perseteruan KPK dan Polri jilid ke dua. Menilik kronologis perseteruan KPK dan Polri jilid ke dua dimulai dari penyelidikan serta pengembangan kasus penggelapan dana PT. Citra Mandiri

Metalindo Abadi milik Budi Susanto yang dilakukan oleh Sukotjo Sastronegoro Bambang. Budi Susanto dan Sukotjo Sastronegoro Bambang adalah mantan rekanan bisnis dalam pengadaan simulator kemudi di Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri. Sukotjo Sastronegoro Bambang sendiri telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bandung selama tiga tahun enam bulan. Sukotjo sendiri sejak November 2011 telah menjalani hukumannya di rumah tahanan Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat. Singkat cerita kerja sama mereka berdua dalam pengadaan simulator kemudi di Korps Lalu Lintas Mabes Polri yang awalnya berjalan lancar, berakhir ketika Sukotjo tak mampu memenuhi tenggat waktu pengerjaan proyek tersebut (Setyarso, 2012: 28).

Lima bulan setelah penahanan Sukotjo tepatnya tanggal 23 April 2012 skandal kasus yang kemudian menjadi pemantik pengungkapan Irjen. Pol. Djoko Susilo sebagai tersangka terkuak ke publik. Majalah berita mingguan Tempo edisi tersebut menurunkan laporan panjang berjudul “Simsalabim Simulator SIM” (Setyarso, 2012: 30). Tak pelak pemberitaan tersebut mengusik Divisi Humas Markas Besar Polri dengan mengirimkan surat hak jawab kepada majalah Tempo. Dalam surat hak jawab tersebut Inspektorat Pengawasan Umum Polri menyatakan telah menyelidiki dugaan korupsi itu dan tidak menemukan kesalahan apapun. KPK sendiri pada waktu itu masih belum berani untuk langsung bertindak, Abraham Samad cs merasa belum mempunyai bukti kuat. Hal ini diyakini karena KPK sementara itu hanya baru menerima bukti-bukti serta pelaporan dari Sukotjo dan belum melakukan penyidikan mandiri secara mendalam. Seiring berjalannya waktu, setelah empat bulan berlalu sejak tulisan tersebut diterbitkan, tuduhan

Sukotjo terhadap keterlibatan sejumlah perwira tinggi dalam skandal simulator mendapatkan titik temu. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketegasan dan keberanian KPK untuk menetapkan Irjen. Pol. Djoko Susilo sebagai tersangka korupsi proyek tahun anggaran 2011 ini. Tak selang berapa lama setelah pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan KPK pihak Markas Besar Kepolisian tidak mau tinggal diam, mereka juga mengumumkan serta menetapkan Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Sukotjo S. Bambang, Budi Susanto, dan Legimo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keadaan ini tentunya sangat bertentangan dengan surat hak jawab Polri yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Saut Usman kepada Majalah Tempo empat bulan lalu (Setyarso, 2012: 35).

KPK dan Polri sama-sama tak mau kecolongan semenjak peluit dan si peniup peluit kasus simulator sim ini berkicau. Alhasil KPK memberanikan diri untuk cepat melakukan penggeledahan di Markas Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri Senin, 30 Juli 2012. Tiga puluh anggota satuan tugas KPK terdiri dari penyidik, jaksa, dan penyelidik datang beriringan menggunakan tujuh buah mobil menuju lokasi penggeledahan yang beralamatkan di Jalan M. T. Haryono Kavling 37-38, Jakarta Selatan (Setyarso, 2012: 9). Penggeledahan tersebut dipimpin langsung oleh Kompol Novel Baswedan. Penetapan untuk menggeledah markas Korps Lalu Lintas berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pagi harinya. Keberadaan surat penetapan ini melengkapi surat perintah dimulainya penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan simulator kemudi untuk Surat Izin Mengemudi tahun anggaran 2011 di

mana telah diputuskan oleh pemimpin KPK satu minggu sebelum penggeledahan. Persiapan demi persiapan dilakukan dengan baik oleh KPK, karena korupsi simulator sim bukan perkara biasa. KPK sudah menetapkan genderang perang terhadap kasus korupsi simulator sim, meskipun tau akibatnya akan kembali lagi terjadi perseteruan dengan Polri.

Penggeledahan tanggal 30 Juli 2012 oleh KPK merupakan gebrakan terberani dalam sejarah berdirinya lembaga ini. Keduanya (KPK dan POLRI) memiliki kekuasaan akan penanganan tindak kejahatan korupsi. Keduanya juga memiliki kepentingan politik dalam penindakan kejahatan korupsi.

### **B. Ideologi Tiga Surat Kabar Nasional**

Berikut peneliti lampirkan sejarah singkat serta ideologi tiga surat kabar harian nasional. Tiga surat kabar tersebut ditentukan sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penjelasan sederhana seperti alasan pemilihan media telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tepatnya pada bagian latar belakang penelitian. Faktor lain yang turut andil dalam pemilihan tiga surat kabar harian ini adalah ketiganya memiliki struktur keredaksian yang jelas, khususnya dalam bagian (*desk*) foto. Ketiganya memiliki *chief* editor/redaktur foto yang mengepalai semua redaktur foto. *Chief* redaktur foto bertanggung jawab penuh terhadap foto-foto yang diterbitkan (Wijaya, 2011: 42). Aliran pemilihan (seleksi) foto *headline* ketiga harian ini jelas, sehingga kualitas tiga foto *headline* yang menjadi objek penelitian tidak perlu diragukan lagi.

## **B. 1. Surat Kabar Harian Kompas**

*Kompas* pertama kali terbit tanggal 28 Juni 1965. Pada waktu itu Auwjong Peng Koen yang kemudian mengganti namanya menjadi Petrus Kanisius (PK) Ojong bersama dengan Jakob Oetama adalah dua tokoh di balik penerbitan *Kompas*. Cerita sebelum *Kompas* berdiri, dua tokoh yang berbeda latar belakang suku, budaya, serta pendidikan itu telah berhasil mendirikan sebuah majalah bernama *Intisari*. Cikal bakal ide untuk mendirikan *Kompas* tidak bisa lepas pada identitas keagamaan yang sangat kental di era tahun 60an. Hal ini terjadi karena hampir semua tokoh-tokoh pendiri tersebut berasal dari Yayasan Bentara. Para pendiri Yayasan Bentara sendiri berasal dari beberapa organisasi Katholik, mulai dari Wanita Katholik, Pemuda Katholik, hingga Partai Katholik. *Kompas* diakui lahir pada saat hak menyalurkan aspirasi politik masyarakat hanya boleh dimiliki oleh partai politik. *Kompas* berafiliasi dengan Partai Katolik yang saat itu dipimpin oleh I.J. Kasimo. Setelah keharusan untuk berafiliasi diiadakan, *Kompas* melepaskan diri dan kemudian berdiri secara mandiri. Selanjutnya dalam susunan awal-awal redaksional *Kompas*, Jakob Oetama diposisikan sebagai pemimpin redaksi sedangkan PK. Ojong sebagai pemimpin umum. Di awal perjalanannya, *Kompas* menumpang di rumah Jakob Oetama hingga kemudian berpindah di percetakan PT Kinta. Oplah pertama *Kompas* sebanyak 4800 eksemplar hingga kemudian dalam tempo tiga bulan meningkat menjadi 8003 eksemplar (Mallarangeng, 2010: 50-51).

Gaya penulisan serta pemberitaan yang dimiliki *Kompas* tak bisa dilepaskan dari PK Ojong dan Jakob Oetama. Keduanya memiliki gaya penulisan

yang berbeda, PK Ojong lebih berani, lugas, sederhana, dan mudah dicerna, sedangkan gaya penulisan Jakob Oetama menonjolkan gaya kritik ‘bijak’, tidak langsung dan implisit. Sejak tahun 1980 secara resmi Jakob Oetama memegang kendali editorial *Kompas* dikarenakan meninggalnya PK Ojong. Kepemilikan *Kompas* dikendalikan secara penuh oleh Jakob Oetama. Hal ini kemudian berdampak pada pemberitaan *Kompas* yang lebih berhati-hati dan moderat dalam memberitakan isu-isu politik sensitif. Dalam wawancara (2004) seperti yang dikutip dari Keller (2009: 46) menggambarkan kehati-hatian khas *Kompas* yaitu melaksanakan sensor dengan gaya menulis ‘Jurnalisme Kepiting’ di mana ‘berita kita tulis, tulis, tulis makin naik, dan naik, dan makin berani, ada sinyal kuning (bahaya), kita mundur’. Gaya ini yang meletakkan *Kompas* pada posisi cukup aman selama masa orde baru. Tercatat *Kompas* hanya mengalami dua kali pelarangan terbit yang merupakan larangan umum yakni setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 serta setelah demonstrasi mahasiswa besar-besaran akhir tahun 1970.

*Kompas* berada dalam tradisi sebuah perusahaan keluarga. Di *Kompas*, Jakob Oetama berperan sekaligus memandang dirinya sendiri sebagai ayah sebuah keluarga besar. Hal ini tercermin dari cara Jakob Oetama untuk mengurus perusahaan, dimana masih menolak kegiatan-kegiatan serikat pekerja. Ada pun serikat pekerja yang ada di *Kompas* disebutkan Perkumpulan Karyawan *Kompas* (PKK), perkumpulan ini hadir secara internal (Keller, 2009: 47-48). Wartawan *Kompas* tidak diberi jaminan secara tertulis untuk secara bebas mengikuti hati nuraninya, melainkan diselesaikan pada tiap kasus. Tapi pada dasarnya wartawan

tidak bisa menolak tugas peliputan yang diberikan. Dimungkinkan penolakan pada pendekatan antar-pribadi, namun peliputan tetap dilakukan oleh wartawan lain. Karena menjunjung tinggi kultur Jawa maka penawaran bisa dinegosiasikan (Keller, 2009:49). Jati diri dalam proses sekaligus tujuan untuk menjiwai jurnalistik pada *Kompas* mengacu pada nilai “humanisme transendental”. Sang pemilik mengarahkan nilai-nilai “humanisme transendental” sebagai arti kemanusiaan. Kemanusiaan yang dilengkapi kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada nilai-nilai yang menyempurnakan. Maka hendaknya *Kompas* menyajikan nilai-nilai humanis kepada pembacanya.

Sebagai surat kabar, mau tak mau menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk menyampaikan nilai-nilai humanisme dalam pemberitaannya. Nilai-nilai itu takkan tersampaikan, jika bahasa yang digunakan adalah bahasa kering, formal, abstrak, dan rasional. Maklum, humanisme tak hanya meyangkut rasio dan otak, tetapi juga seluruh diri manusia, termasuk perasaan, instuisi, dan emosi. Tahun 2012, harian Kompas telah memiliki lebih dari dua juta pembaca dengan pencapaian oplah terbesar mencapai 530.000 eksemplar setiap hari di semua propinsi di Indonesia (“Catatan Oplah Harian Kompas tahun 2012”. [print.kompas.com/about/index.html](http://print.kompas.com/about/index.html). (diakses tanggal 17 maret 2012).

## **B. 2. Surat Kabar Harian Koran Tempo**

*Koran Tempo* melihat dari sejarah berdirinya di awal tahun 2001, merupakan surat kabar harian nasional termuda yang hadir pasca lengsernya pemerintahan orde baru. Kehadirannya dalam dunia surat kabar nasional tak dapat dilepaskan dari peranan pendahulunya yang hadir dalam kemasan majalah.

Menyinggung sedikit soal Majalah *Tempo*, sejarah mencatat media ini telah banyak sekali mengalami masa-masa sulit yaitu pembredelan. Majalah *Tempo* dibredel pemerintah pada 21 Juni 1994 setelah menulis Laporan Utama soal pembelian kapal perang murah dari Jerman. Pembredelan tersebut mengakibatkan gelombang protes yang tidak terduga dan pendirian Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang dianggap sebagai gerakan melawan PWI yang sangat dekat dengan pemerintah. Anggota AJI dan wartawan *Tempo* sebagian bergerak di bawah tanah. Maka pada tahun 1996 dihasilkan majalah *online Tempo Interaktif*. Selanjutnya di tahun 1998 majalah *Tempo* kembali diterbitkan oleh PT Tempo Inti Media Tbk. Para pendiri sekaligus alumni *Tempo* belajar dari beberapa peristiwa pembredelan yang telah mereka alami, dan kesimpulannya ialah membuat “perahu-perahu” baru. Tak hanya mengandalkan satu media saja, oleh karena itu perlu segera diciptakan media-media baru. Selanjutnya PT Tempo Inti Media Tbk. mendirikan percetakan PT Temprint. Pada tahun 2000 Tempo Inti Media adalah perusahaan media pertama Indonesia yang masuk bursa saham. Dari penghasilannya tersebut dibiayailah harian *Koran Tempo* yang terbit sejak tahun 2001 (Keller, 2009:56-57).

Nama besar majalah *Tempo* tak serta-merta berlaku buat sang adik. *Koran Tempo* tak langsung diterima pemasang iklan dan pembaca. Faktanya, *Koran Tempo* masih kalah jauh dari *Kompas* dan *Media Indonesia*, yang sudah lama hadir. Alhasil, *Koran Tempo* sempat berdarah-darah. Butuh delapan tahun menampilkan koran yang “enak dibaca dan perlu”. Beberapa terobosan coba dilakukan dalam beberapa hal tanpa terkecuali dalam pemberitaan. *Koran Tempo*

terkenal berkat jurnalisme investigasinya. Selain itu *Koran Tempo* menggunakan elemen-elemen layout yang tidak konvensional dan memuat banyak grafik informasi dan karena itu dibaca terutama oleh pembaca muda dari kalangan menengah ke atas. Sebanyak 80% pembacanya berumur antara 20-44 tahun. *Koran Tempo*, seperti juga majalahnya menganggap dirinya sendiri sebagai bagian dari ujung tombak modernisasi masyarakat Indonesia, sebagai “clearing house” dan juga terkenal di luar negeri sebagai media yang progresif dan demokratis. Banyak wartawan *Tempo* yang mendapat berbagai penghargaan internasional berkat komitmen mereka pada jurnalisme (Keller, 2009:57).

Sejak awal *Tempo* berdiri, Goenawan Mohamad sebagai pendiri sekaligus orang yang pernah memegang jabatan Pemimpin Redaksi *Tempo* selalu menegaskan pemisahan bagian redaksi dan iklan. Upaya tegas untuk menciptakan “garis api” antara iklan dan redaksi ditunjukkan untuk mencegah wartawan ikut-ikutan mencari iklan. Dampak akan keberadaan ini melahirkan secuil kesimpulan bahwa *Tempo* adalah “media tanpa majikan”. Garis api yang memisahkan bagian redaksi dan bagian iklan dipegang teguh. Memilih independen dalam mengejar pertumbuhan bisnis. Oleh karena itulah di *Tempo* tidak memiliki pemilik saham terbesar. Lebih dari 50% kepemilikan perusahaan dipunyai oleh yayasan-yayasan, alhasil di *Koran Tempo* tidak ada pemilik media dalam artian yang biasanya. Saham-saham perusahaan *Tempo* dimiliki oleh perusahaan PT Grafiti Pers, Yayasan Jaya Raya, Yayasan 21 Juni 1994 dan Yayasan Karyawan *Tempo*. Sebanyak 17% saham dipasarkan di bursa. Komisaris utamanya adalah pendiri *Tempo* Goenawan Mohamad. Management *Koran Tempo* juga tidak terdapat

anggaran dasar redaksi atau sebuah badan perwakilan yang mewakili kepentingan redaksi. Visi dan misi serikat pekerja bertujuan untuk kepentingan sosial, seperti juga di media-media lainnya. Namun staf *Tempo* dapat terlibat dalam politik perusahaan melalui yayasan karyawan sebagai pemegang saham *Tempo*. Kemudian dalam permasalahan personal seperti penempatan reporter atau penentuan pimpinan redaksi, staf *Tempo* tidak memiliki hak untuk ikut menentukan keputusan, demikian keterangan dari serikat pekerja seperti yang dikutip dalam Keller (2009: 60).

### **B. 3. Surat Kabar Harian Media Indonesia**

Harian *Media Indonesia* atau yang lebih dikenal dengan sebutan MI diterbitkan pertama kali pada tanggal 19 Januari 1970. Berada di bawah lembaga Yayasan Warta Indonesia oleh Teuku Yousli Syah sebagai ketua Yayasan sekaligus sebagai pendiri harian tersebut. Pada masa awal penerbitan, *Media Indonesia* yang memiliki motto ‘Pembawa Suara Rakyat’ hanya mampu menerbitkan 4 halaman saja dengan tiras amat terbatas. Jumlah halaman terbitan sedikit kemudian ditambah dengan tiras terbatas mengantarkan MI masuk pada kategori koran kuning. Bagaimana tidak, karena hampir sebagian pemberitaannya tentang ‘gosip’. Pada tahun 1976 perlahan namun pasti *Media Indonesia* yang beralamatkan di Jl. MT. Haryono mampu bertahan serta menambahkan 4 halaman lagi dalam satu hari penerbitan. Sejarah mencatat di awal tahun 1980an media ini mengalami beberapa kendala yaitu di bidang pengembangan sumber daya (pekerja) dan penambahan modal. (www.mediaindonesia.com, 2013).

Delapan belas tahun perjalanan, lebih tepatnya pada tahun 1988 Teuku Yousli Syah selaku pendiri *Media Indonesia* mencoba untuk menggandeng seorang pengusaha yang secara kebetulan sebelumnya menjabat sebagai mantan pimpinan surat kabar *Prioritas* yaitu Surya Paloh. Surat kabar *Prioritas* sendiri Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut oleh pemerintah di bawah Menteri Penerangan yang kala itu dijabat oleh Harmoko, karena dituduh memuat laporan tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, bersifat sinis, insinuatif, tendensius dan secara teknis isinya melenceng dari apa yang tertulis di SIUPPnya (www.mediaindonesia.com, 2013b). Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum di kalangan pers pada waktu itu (masa orde baru) bahwa setiap media yang terlalu vokal terhadap kebijakan pemerintah akan dicabut izin usaha penerbitannya.

Apa yang dilakukan oleh pemilik awal *Media Indonesia* untuk menggandeng seorang pengusaha bukannya tanpa alasan. Hal ini sengaja dilakukan karena dipicu oleh tindakan deregulasi ekonomi di Indonesia pada tahun 1980an, banyak perusahaan media cetak yang didirikan dan dikelola oleh pengusaha. Kerja sama ini setidaknya menggabungkan dua kekuatan baru yaitu kekuatan pengalaman dan kekuatan modal. Perubahan ini menghadapkan pada realitas bahwa pers tidak semata menanggung beban idealnya tapi juga harus tumbuh sebagai badan usaha. Surya Paloh sendiri merupakan seorang pengusaha dan tidak memiliki latar belakang jurnalistik. Tercatat Hotel Bali Intercontinental dan Sheraton Jakarta sebagai miliknya (Keller, 2009:66).

Tiga tahun berjalan dengan manajemen baru di bawah naungan PT. Citra Media Nusa Permana, di mana menempatkan Surya Paloh sebagai Direktur Utama dan Teuku Yousli Syah sebagai Pemimpin Umum. Jabatan Pemimpin Perusahaan dipegang oleh Lestary Luhur, serta alamat kantor *Media Indonesia* kembali menempati alamat baru di Jl. Gondandia Lama no. 46 Menteng, Jakarta Pusat. Pada tanggal 11 Maret 1989 terbitlah harian *Media Indonesia* dengan wajah baru dan segar. Terbit dengan 16 hingga 20 halaman berwarna setiap harinya dengan tiras mencapai 85.000 eksemplar. Gebrakan selanjutnya terjadi di tahun 1992 di mana Media Indonesia berani untuk menerbitkan suplemen berita *real estate*, keuangan, otomotif, wisata dan delik hukum. Hadirnya beberapa suplemen di atas yang belum pernah dilakukan oleh Surat Kabar Harian lainnya membuat *Media Indonesia* semakin diterima oleh masyarakat serta sedikit berada di atas angin. Selanjutnya pada awal tahun 1995 menjadi satu titik puncak pencapaian *Media Indonesia* bersama Surya Paloh. Tepat di usianya ke 25 *Media Indonesia* menempati kantor barunya yang sengaja di buat dalam satu kawasan, yaitu berada di Komplek Delta Kedoya, Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Jakarta Barat ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), diakses tanggal 1 Mei 2013). *Layout* yang inovatif, gaya bahasa yang lugas, strategi pasar yang agresif dan tumbuhnya golongan menengah pada awal tahun 1990an akibat dari booming ekonomi, juga menjadi beberapa faktor lain penunjang keberhasilan SKH Media Indonesia.

Melanjutkan tampuk kepemimpinan terdahulu, Surya Paloh yang memiliki 100% saham dan memimpin bisnis dari grup *Media Indonesia*, ternyata memiliki

media lain selain SKH Media Indonesia. Tercatat ada *Metro Tv*, *Koran Prioritas*, *Lampung Post* dan *mediaindonesia.com*. Sebagai pemilik, ia menjabat direktur perusahaan dan menetapkan haluan jurnalistik surat kabarnya. Pemimpin Redaksi SKH Media Indonesia ditunjuk langsung olehnya sebagai penanggung jawab berita sehari-hari. Digambarkan sebagai seorang pemimpin idealis oleh karyawannya. Seperti salah satunya ialah pemimpin Redaksi SKH Media Indonesia di tahun 2004, kala itu diwawancari langsung oleh peneliti dari Jerman bernama Anett Keller yang dikutip dari bukunya memaparkan (Keller, 2009:68);

*“Kita beruntung bekerja pada orang yang punya idealisme tinggi untuk urusan pers. Surya Paloh, pertama, tidak pernah digaji di sini. Kedua, setiap dividen atau keuntungan yang seharusnya masuk kepada pemilik modal dia tanam kembali ke Media Indonesia dan Metro TV. Jadi dia tidak pernah ambil uang (untung) dari sini, karena ini merupakan idealisme dia. Dia punya bisnis lain yang dia hidup dari sana. Jadi kalau bicara itu, setiap kali ada pertentangan antara usaha dan redaksi, yang selalu dimenangkan adalah redaksi”.*

Di sisi lain beberapa kritikus media di Indonesia dan penulis sendiri justru melihat hal sebaliknya jika dibandingkan dengan pendapat Pemimpin Redaksi. Dalam situasi ini grup *Media Indonesia* digunakan sebaik-baiknya sebagai alat serta kepentingan berpolitik Surya Paloh. Surya Paloh tercatat sebagai salah satu Kader Parpol Golkar sejak tahun 1971 hingga 2010. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Presiden pada pemilu tahun 2004 silam. Dalam pemilu tahun 2004 namanya masuk dalam jajaran kandidat Wapres dan Cawapres, meskipun pada akhirnya Golkar memilih Jusuf Kalla. Di tahun 2009 ia melakukan hal yang sama dan kembali lagi mengalami kekalahan karena pada waktu Jusuf Kalla yang kembali maju sebagai calon Presiden lebih memilih untuk menggandeng Jend.

Purn. Wiranto dari Partai Hanura. Kegagalan untuk kedua kalinya membuatnya memilih untuk mendirikan Parpol baru yang berangkat dari Organisasi Nasional bernama Nasional Demokrat. Masih sama seperti metode yang lama, Surya Paloh kembali menggunakan *Media Indonesia* sebagai alat berpolitik.

### **C. Fotografi Jurnalistik sebuah kekuatan visual**

Sebuah fenomena melanda beberapa benua penuh dengan peradaban modernnya yang merupakan wakil dari judul sub-bab di atas. Di mana pemerintah di Eropa dan Amerika mencoba mengajak penduduknya untuk lebih memahami fotografi sebagai bagian dokumentasi kehidupan. *To teach and to persuade* (untuk belajar dan membujuk), beberapa perusahaan dan kantor berita mencoba untuk menggunakan jasa fotografer untuk merekam realitas yang ada di masyarakat, mereka dikirim ke beberapa kota untuk mendokumentasikan apa yang mereka lihat. Bisa dikatakan fotografi saat itu juga sebagai alat bantu untuk penelitian, kemudian hasilnya adalah untuk bahan pembelajaran rakyat (Badger, 2007: 78).

Memasuki masa-masa perang dunia fotografi juga mempunyai perannya tersendiri, dengan metode *Decisive Moment* (momentum puncak) yang terkenal dari Henry Cartier Bresson seorang fotografer asal Perancis memberikan sebuah “jalan” bagi para fotografer perang saat itu. Moment yang menentukan, sontak istilah ini menjadi sangat terkenal dikalangan fotografer perang saat itu, bahkan sekarang pun istilah tersebut masih berlaku. *Decisive moment* dengan kata lain adalah titik yang memungkinkan fotografer merekam sebuah kejadian dengan titik puncaknya, pada saat yang paling menentukan. Keberhasilan menggunakan metode ini akan mampu mengabaikan penggunaan komposisi dan teknis foto

yang lemah. Semua lenyap ketika moment puncak (terbaik) terekam dengan sempurna (Kobre, 2004: 113).

Pada masa perang dunia, teori *decisive moment* Bresson berhasil mengubah prespektif orang terhadap perang dunia itu sendiri. Salah satunya adalah ketika seorang jurnalis foto Eddie Adams meliput perang di Vietnam, ia berhasil mengambil foto saat Jenderal Nguyen Ngoc Loan, kepala Kepolisian Vietnam Selatan mulai menarik pelatuk pistol kearah seorang komandan gerilyawan Vietkong. Adams berhasil merekam puncak dari peristiwa itu ditunjukkan dengan ekspresi wajah tentara vietkong yang ditodongkan pistol serta senjata yang digunakan oleh sang jenderal untuk mengeksekusi. Akhirnya adalah foto tersebut mendapatkan penghargaan dan membuat dunia (masyarakat luas) mengubah opininya secara khusus masyarakat Amerika terhadap perang Vietnam di mana memicu gerkan anti perang dan menginspiraasi lahirnya generasi bunga di Amerika pada waktu itu (Badger, 2007: 110).



Gambar 2.1

Henri Cartier-Bresson

(<http://iconicphotos.wordpress.com/tag/henri-cartier-bresson>)

Gambar di atas menjadi terkenal karena cikal bakal mengenai teknik memotret yang terkenal dengan istilah *freezing*. Foto di atas adalah karya Henri Cartier Bresson menggunakan teknik *freezing*. *Freezing* adalah salah satu teknik dalam memotret dengan menggunakan kecepatan rana di atas 125/detik untuk menghentikan objek bergerak menjadi seolah-olah diam (beku). Teknik *freezing* adalah cikal bakal dari *decisive moment*. Foto tersebut digunakan oleh majalah *Time* untuk kebutuhan edisi khusus *The Photo of the Century*. Foto yang dibuat

tahun 1932 tersebut diberi judul *Derriere la Gare Saint-Lazare* menceritakan tentang perbaikan pagar belakang stasiun kereta api Gare Saint Lazare Paris.

Apa yang perlu dilihat dari sumbangsih Bresson dan fotografi, pada umumnya adalah sebuah perjalanan fotografi yang membuat orang dapat berpikir lebih terbuka terhadap realitas yang ada disekitarnya. Terbukti Bresson mencoba untuk “menciptakan” sebuah paham dalam fotografi yang kalau coba ditelaah lagi hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan kita dan perjalanan sejarah. Kemudian selanjutnya Ansel Adams seorang fotografer dari Amerika membawa perubahan juga kedalam dunia fotografi di era tahun 1940-an (Badger, 2007: 134) dengan foto-foto pemandangannya, dengan menggunakan teori zona sistem di mana terdapat pengukuran cahaya yang rata antara masing-masing warna yang akan kita foto akan menghasilkan kualitas foto yang baik pula. Sebagai pemicu dari foto-foto pemandangan Ansel Adams, perkembangan foto pemandangan tidak hanya sebatas alam yang indah, namun juga berkembang pada pemandangan kehidupan sosial di masyarakat.

Beralih dan kembali lagi pada hakekat foto jurnalistik sebagai sebuah kekuatan visual. Praktek akan jurnalisme visual telah dikenal dengan sejumlah pendekatannya. Tahun 1880 pendekatan foto dokumenter diperkenalkan oleh Jacob Riis dan Lewis Hine. Riis mendekati peristiwa sosial berujung pada penerbitan bukunya yang berjudul *“How the Other Half Live”* yang mengungkapkan dunia gelap para pekerja di bawah umur yang diperkerjakan oleh industri di Amerika. Hine merekam kegiatan anak-anak di bawah umur yang bekerja di pabrik-pabrik Amerika. Dari buku ini membuat pemerintah Amerika

merivisi Undang-Undang perburuan mereka demi melindungi anak-anak di bawah umur dari eksploitasi kerja (Leonardus dan Kartasmita, 2008: 144). Fotojurnalistik adalah sebuah medium sajian informasi untuk menyampaikan beragam bukti visual yang ada di masyarakat, bahkan hingga kerak di balik peristiwa tersebut. Jacob Riis dan Lewis Hine telah membuktikan bawasannya kamera bukan hanya sebagai alat untuk merekam sebuah kejadian atau peristiwa saja tetapi dapat sebagai “senjata” yang potensial untuk merubah kehidupan sosial masyarakat.

Era perang dunia adalah masa-masa kelam sekaligus membanggakan dalam perjalanan foto jurnalistik dunia. Kelam secara khusus karena pada saat itu terjadi sensor oleh pemerintah Amerika terhadap foto para tentara yang gugur saat perang. Saat itu banyak jurnalis foto yang mengabadikan perang dunia pertama maupun kedua, dan saat itu juga realitas perang terekam dengan gambling, kehancuran, kematian, kemenangan terekam dengan baik oleh jurnalis foto perang waktu itu. Hal ini membuat pemerintah Amerika cemas, ditakutkan akan berdampak pada opini masyarakat Amerika yang berpikiran bahwa tentara yang berperang kemungkinan besar akan mati di medan perang ketakutan akan keluarga yang dikirim ke medan perang dan tidak bisa kembali dengan selamat, serta psikologis para tentara dan keluarga tentara. Akhirnya pemerintah membuat sensor terhadap media yang akan membahas tentang perang saat itu, kebebasan pers sedikit diatur oleh pemerintah. Masa itu tidak berlangsung lama seiring hasil-hasil jepretan jurnalis foto perang mampu mengubah opini masyarakat luas. Sebut saja Nick Ut seorang foto jurnalis lepas yang berhasil merekam gambar kekerasan

dan kekejaman perang Vietnam. Dalam fotonya tersebut merekam sebuah metafora kematian dan ketidakberdayaan atas foto anak-anak Vietnam yang histeris berlarian meninggalkan desanya usai serangan napalm pasukan Amerika (Wijaya, 2011: 50). Foto ini pada akhirnya berhasil membawa Nick Ut mendapatkan penghargaan dan di samping itu masyarakat dunia akhirnya mengetahui kekerasan perang terjadi di Vietnam yang dilakukan oleh Amerika. Berbagai tindakan dan penolakan terhadap perang Vietnam muncul di beberapa negara yang menginginkan diakhirinya perang ini.



Gambar 2.2

Foto hasil jepretan Robert Capa yang mengandung *decisive moment*, menggambarkan pendaratan tentara sekutu Amerika di Pantai Omaha, Normandy, Prancis sebagai rangkaian awal perang dunia ke dua.  
(<http://www.icp.org/robert-capa-100>).

Contoh foto lainnya jauh sebelum perang Vietnam, fotografer berkebangsaan Austria bernama Robert Capa yang selama masa hidupnya mengabadikan peristiwa perang. Foto Robert Capa yang mengabadikan pendaratan tentara sekutu Amerika dalam rangka melawan kekuatan tentara Jerman pada masa perang dunia ke dua menunjukkan serial dokumentasi perang. Sebagai tanda kekuatan Amerika yang mengarah pada nilai menjaga perdamaian dunia. Meskipun dari sisi kualitas foto tersebut terlihat kurang bagus, namun peristiwa serta *decisive moment* yang terkandung telah mempengaruhi opini masyarakat luas akan perang dunia ke dua dan secara khusus kekejaman tentara Nazi Jerman.

Fokus kehidupan manusia dapat dikatakan menduduki puncak piramida fotojurnalistik. Tidak berlebihan jika dikatakan kehidupan adalah suatu cita-cita universal bagaimanapun dasarnya peperangan dan bentuk kekejaman lain, dan fotojurnalistik wajib menghantar citra tersebut untuk menyebutnya kekal. Dimanapun jurnalis foto berada untuk meliput peristiwa apapun, arti kehidupan tetaplah yang terpenting (Leonardus dan Kartasasmita, 2008: 146).